

## DAFTAR PUSTAKA

- Alex, Kamus Ilmiah Populer Kontemporer, (Surabaya: Karya Harapan, 2005).
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988).
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Zakat*, Cet. 1 (Surabaya: Penerbit Bintang, 2001).
- Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin.  
 baznaz.go.id diakses pada tanggal 23 Juli 2019.
- Berita Resmi Pusat kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) No. 18/BR/IX/2017.
- Berita Resmi Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia No.1/ON/01/2019.
- Djuanda, Gustian, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2011).
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002).
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998).
- Hasan, Ahmadi, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2017).
- Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003).
- Hidayatullah, Syarif, *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*, (Jakarta: Al-Kautsar Prima Indocamp, 2018).

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014).

Jalil, Abdul, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019).

Kementrian Keuangan, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2017 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Kementrian Keuangan, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-08/PJ/2021 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Kementrian Keuangan, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Majma Lughah al-‘Arabiyah, *al-Mu’jam al-Wasith* (Mesir: Daar el-Maarif, 1972), Juz 1, h. 396; dikutip dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).

Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2005).

Muhamad, Sahri, *Mekanisme Zakat Dan Permodalan Masyarakat Miskin*, (Malang: Bahtera Press, 2006).

Muhammad, Syaikh bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008).

Narwanti, Sri, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Istana Media, 2018).

pajak.go.id diakses pada tanggal 23 Juli 2019.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Bab XI Tentang Pasal 29, (Jakarta: PT. Grasindo, t.Th.).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Rosana, Ellya, “Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 201.
- Salman, Kautsar Riza, *Perpajakan PPh dan PPN*, (Jakarta: Indeks, 2017).
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982).
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011).
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN-Malang Press, 2017).
- Sumarsan, Thomas, *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, (Jakarta: Indeks, 2017).
- Sumarsan, Thomas, *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, (Jakarta: Indeks, 2017).
- Suprayitno, Eko, Radiah Abdul Kader dan Azhar Harun, “Zakat sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia”, *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 1, Juni 2013: 1-28.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005).
- Wawancara dengan Bapak Bapak Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Ketua Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan, 17 Januari 2020.
- Wawancara dengan Bapak Hendratna Sulistya, Ketua Seksi Bidang HUMAS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, 06 Februari 2020.
- Wawancara dengan Bapak Mahmud, Ketua Seksi Bidang HUMAS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, 06 Februari 2020.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Nusri, Kepala Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin, 17 Januari 2020.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Iqbal, pegawai Kantor Pajak Pratama (KPP) Kota Banjarmasin, pada Kamis, 19 Oktober 2017.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf, Staff Keuangan dan Pajak PT. Borneo Mega Sukses, pada Kamis, 19 Oktober 2017.

Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia, Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, (Jakarta: Kencana, 2015).

<https://pajak.go.id/id/tugas-dan-fungsi-0> diakses pada tanggal 8 Februari 2020.